

IMPLEMENTASI FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN: STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU

Ma'ruf¹, Evandha Febrianti², Zabrina Salsabila Salma³, Hanna Filjanah⁴, Aliffa Leila Paramitha⁵, Gina Rahmadani⁶

maruf.lk@upi.edu¹, evandhafeb01@upi.edu², zabrinasalsa16@upi.edu³, hannafljnh@upi.edu⁴, aliffaparamitha@upi.edu⁵, ginarahmadani138@upi.edu⁶

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Fasilitas di pelabuhan merupakan hal yang harus diperhatikan demi keberlangsungan aktivitas di pelabuhan tersebut. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu telah berusaha memenuhi kebutuhan fasilitas sesuai regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik implementasi fasilitas pelabuhan perikanan di PPN Karangantu. Fokus analisisnya adalah pada fasilitas yang ada dengan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui metode purposive sampling, wawancara dan observasi langsung. Analisis data terkait fasilitas dilakukan dengan metode komparatif, membandingkan fasilitas di PPN Karangantu dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN Karangantu telah memiliki berbagai fasilitas yang sesuai regulasi, namun beberapa masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang optimal juga fasilitas pelabuhan yang ada juga memberikan dampak positif secara sosial-ekonomi bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan demi peningkatan berlanjut fasilitas pelabuhan bagi pihak PPN Karangantu dan membantu pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Fasilitas, Pelabuhan Perikanan, PPN Karangantu.

ABSTRACT

Harbor facilities are an essential factor that must be considered for the activities in the harbor. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu has made efforts to meet the facility according to regulations. This study aims to investigate the implementation practice of port facilities at PPN Karangantu. The focus of the analysis is on the existing facilities and their socio-economic impacts. The research method used is data collection through purposive sampling, interviews, and observation. Data analysis is carried out using a comparative method, comparing the facilities at PPN Karangantu with the Regulation. The results show that PPN Karangantu has various facilities that comply with regulations, but some still need to be improved. The facilities also have a positive socio-economic impact on fishermen and the community. This research is expected to provide valuable insights for the improvement of PPN Karangantu's facilities and the development of marine resources in the region.

Keywords: Facilities, Fishing Port, PPN Karangantu.

PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur yang vital dalam industri perikanan dengan mendukung kegiatan penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Implementasi fasilitas pelabuhan perikanan yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan sektor perikanan suatu daerah. Studi kasus pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu di Serang menjadi sorotan dalam upaya memahami praktik implementasi fasilitas pelabuhan perikanan di Indonesia.

PPN Karangantu, sebagai salah satu pelabuhan perikanan yang penting di Serang, menawarkan gambaran yang menarik tentang bagaimana fasilitas pelabuhan perikanan dijalankan dan dikelola dalam konteks lokal. Melalui studi kasus ini, dapat dianalisis

berbagai aspek terkait implementasi fasilitas pelabuhan perikanan, mulai dari infrastruktur fisik, pengelolaan sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik implementasi fasilitas pelabuhan perikanan di PPN Karangantu, dengan fokus pada efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Dengan pemahaman mendalam tentang implementasi fasilitas pelabuhan perikanan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sektor perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, studi kasus mengenai implementasi fasilitas pelabuhan perikanan di PPN Karangantu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kinerja dan manajemen pelabuhan perikanan, serta memperkuat daya saing industri perikanan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil keputusan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan pelabuhan perikanan yang berkelanjutan dan efisien dalam mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Indonesia.

Fasilitas pelabuhan perikanan merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan sistem aktivitas perikanan, pelabuhan perikanan juga didukung oleh kegiatan pemerintahan. Pelabuhan ini digunakan untuk kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan melakukan bongkar muat ikan. Pelabuhan tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, keberadaan fasilitas yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan (Mufadzal et al. 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, pada bab 2 pasal 4 bagian ketiga, fasilitas pelabuhan perikanan terdiri dari: fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang.

1. Fasilitas pokok mencakup breakwater, revetment, groin, dermaga, kolam, alur pelayaran, jalan komplek, drainase, dan lahan.
2. Fasilitas fungsional meliputi tempat pemasaran ikan, navigasi pelayaran, air bersih, es, bahan bakar, listrik, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, laboratorium pembinaan mutu, kantor administrasi pelabuhan, alat angkut ikan, dan instalasi pengolahan air limbah.
3. Fasilitas penunjang terdiri dari balai pertemuan nelayan, mess operator, wisma nelayan, fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK (mandi, cuci, kakus), pertokoan, dan pos jaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sukandarrumidi (dalam Fazri, 2021) metode purposive sampling adalah penentuan pengambilan sampel atas pertimbangan peneliti yang sesuai dengan maksud dan kriteria tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di PPN Karangantu yang terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada 20 Maret 2024. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana pelabuhan PPN Karangantu. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah staf pelabuhan yang memahami kondisi dan operasional pelabuhan perikanan. Responden ini dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dan berkomunikasi dengan baik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf pelabuhan serta observasi langsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu. Observasi

dilakukan untuk melihat kondisi fisik fasilitas di area pelabuhan, seperti dermaga, gudang, peralatan bongkar muat, dan utilitas lainnya. Analisis data terkait fasilitas dan sarana prasarana dilakukan dengan metode komparatif, yaitu membandingkan kelengkapan fasilitas di PPN Karangantu dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

Sebagai tambahan, peneliti melakukan kajian pustaka terkait topik sarana dan prasarana pelabuhan, termasuk regulasi pemerintah, jurnal ilmiah maupun penelitian sebelumnya. Menurut Pohan (2007), kajian pustaka adalah sebuah penelusuran kepustakaan untuk mengumpulkan data-data ilmiah berbentuk teori, metode, atau penelitian yang sudah ada, baik dalam bentuk buku, naskah dokumen, jurnal, dan lain-lain yang sudah ada di dalam perpustakaan. Data dan informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur digunakan sebagai referensi dalam menganalisis temuan dari observasi lapangan dan wawancara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana di PPN Karangantu dan apakah sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana tersebut di PPN Karangantu. Sehingga, memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fasilitas dan sarana prasarana di PPN Karangantu dan kepatuhannya terhadap standar peraturan yang diberikan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan perikanan adalah fasilitas pelayanan umum bagi nelayan dan bisnis perikanan, berfungsi sebagai pusat pembinaan serta pengembangan kegiatan ekonomi perikanan. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya, yang digunakan sebagai basis operasional untuk berlabuh, merapat, mendaratkan hasil tangkapan, serta menangani, mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan hasil perikanan. (Deptan dan Dephub (1996)).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. PPN Karangantu merupakan pelabuhan nelayan yang cukup besar dan berperan penting sebagai pusat kegiatan perikanan yang memasok sebagian kebutuhan ikan di Provinsi Banten. Pada tahun 1975/1976, Pelabuhan Perikanan Karangantu mulai dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 311/Kpts/Org/5/1978, pelabuhan ini resmi beroperasi dan menjadi UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu tipe C. Seiring perkembangan dan peningkatan kegiatan operasional, pada tanggal 30 Desember 2010, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, serta didahului oleh Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2010 Nomor B.3677/M.PAN-RB/12/2010 tentang Usulan Penataan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu resmi berganti nama dan statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu tipe B. PPN Karangantu memiliki peranan yang sangat penting khususnya di Provinsi Banten, sehingga perlu tersedianya fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

Dalam menerapkan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan,

khususnya bagian ketiga yang membahas fasilitas pelabuhan perikanan untuk menunjang fungsi pelabuhan perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas Pokok

No	FASILITAS	Unit/Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1.	Dermaga	1	2000	Baik	Sudah
2.	Alur Pelayaran	1	1984	Baik	Sudah
3.	Kolam Pelabuhan	1	2012	Rusak	Sudah
4.	Jalan	1	1978	Baik	Sudah
5.	Break Water	1	1977	Baik	Sudah
6.	Revetment	1	1998	Baik	Sudah
7.	Drainase Terbuka	1	1978	Baik	Sudah
8	Dock	1	Sedang Proses	-	-

Fasilitas Pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. (Ruth Phetrosina Soumokil, 2020). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, Pasal 4 ayat 5, Fasilitas Pokok yang harus ada di Pelabuhan Perikanan meliputi : Fasilitas Pokok terdiri dari Lahan, Dermaga, Kolam Pelabuhan, Jalan Komplek dan Drainasse.

Fasilitas pokok pelabuhan yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ini meliputi: dermaga yang sudah ada sejak tahun 2000 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik dengan ukuran panjang/lebar 760m/4m. Dermaga adalah struktur yang dibangun di tepi perairan, seperti pantai, sungai, atau danau, yang berfungsi sebagai tempat kapal berlabuh atau bersandar. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi proses bongkar muat barang atau penumpang dari kapal ke daratan, serta memungkinkan kapal untuk melakukan perbaikan, pengisian bahan bakar, atau perawatan lainnya.

Alur pelayaran yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara ini didirikan sejak tahun 1984 dengan panjang/lebar 530m/185m kondisi perairan dengan kategori tenang, tinggi gelombang 0-1,5m . Alur Pelayaran adalah jalur atau rute yang telah ditentukan di perairan untuk memungkinkan kapal-kapal berlayar dengan aman dan efisien dari satu titik ke titik lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan panduan yang jelas kepada kapal-kapal agar dapat menghindari rintangan, navigasi aman di perairan yang dangkal, dan memastikan keselamatan selama perjalanan laut.

Kolam Pelabuhan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara ini didirikan sejak tahun 2012 dengan panjang/lebar 9700m/50m. Kolam Pelabuhan adalah area perairan yang didesain khusus di dalam pelabuhan untuk kapal-kapal bersandar atau berlabuh sebagai tempat kapal bersandar, dan dermaga sebagai sarana kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau penumpang.

Jalan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara ini sudah ada sejak tahun 1978

dengan panjang/lebar 750m/5m. Jalan merupakan salah satu fasilitas pokok yang penting di dalam pelabuhan. Fungsi jalan dalam konteks pelabuhan adalah untuk memberikan akses yang mudah dan lancar bagi kendaraan bermotor, seperti truk pengangkut barang, mobil pengawas, kendaraan operasional, dan kendaraan penumpang, untuk bergerak dari satu area ke area lain di dalam pelabuhan.

Breakwater yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ini didirikan sejak tahun 1977 dengan ukuran panjang 12378m. Breakwater merupakan struktur pertahanan yang dibangun di sepanjang pantai atau di sekitar pelabuhan untuk melindungi daerah pedalaman dari dampak gelombang laut. Struktur ini bertujuan untuk mengurangi energi gelombang laut sehingga mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh abrasi atau erosi pantai serta menciptakan kondisi perairan yang lebih tenang di dalam pelabuhan.

Revetment yang ada di Pelabuhan Perikanan ini didirikan sejak tahun 1998 dengan ukuran panjang/lebar 700m/2m. Revetment merupakan struktur yang dibangun di sepanjang tepi pantai atau sungai untuk melindungi dari abrasi atau erosi terbuat dari bahan-bahan seperti beton, batu, atau gabion yang dirangkai secara khusus untuk menahan tekanan air yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tepi pantai atau sungai dengan menahan tekanan air serta mengurangi efek erosi.

Drainase terbuka yang ada di Pelabuhan Perikanan ini sudah didirikan sejak 1978. Drainase Terbuka adalah sistem saluran terbuka yang dirancang untuk mengalirkan air hujan atau air permukaan dari suatu area yang terdiri dari saluran-saluran yang dibangun dengan kemiringan tertentu untuk memastikan air dapat mengalir dengan lancar menuju tempat tujuan seperti sungai atau laut fungsinya adalah untuk mencegah genangan air, mengontrol aliran air, dan menghindari terjadinya banjir.

Docking yang ada di Pelabuhan Perikanan ini Sedang Dalam Proses Pembangunan. Docking adalah proses merapatkan kapal ke dermaga atau tempat sandar lainnya untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, atau pemuatan dan pembongkaran barang. Fungsinya adalah untuk memungkinkan kapal berhenti secara aman dan stabil di tepi perairan untuk keperluan yang beragam seperti penumpangan, perbaikan mesin, atau bongkar muat barang.

2. Fasilitas Fungsional

No	FASILITAS	Unit/Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1.	Pasar Ikan	1	2011	Baik	Sudah
2.	Tempat Pengepakan Ikan	1	2009	Baik	Sudah
3.	Tempat Pelelangan Ikan	1	2015	Baik	Sudah
4.	Selasar TPI	1	2017	Baik	Sudah
5.	Bengkel	1	1977	Baik	Sudah
6.	Cold Storage	1	2015	Baik	Sudah
7.	Kantor Administrasi	1	1979	Baik	Sudah
8.	Laboratorium Mutu	1	2005	Baik	Sudah

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan. Tanpa adanya fasilitas fungsional, kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar muat, operasi kapal-kapal nelayan, dan penanganan hasil tangkapan tidak akan berjalan. Sehingga fungsi fasilitas fungsional sangat penting (Juniarto et al., 2020) Fasilitas fungsional memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan kegiatan di pelabuhan perikanan. Mulai dari persiapan sebelum melaut, proses pendaratan hasil tangkapan, hingga menjaga kualitas hasil tangkapan yang didaratkan serta menjangkau pasar yang dituju. Penggunaan fasilitas fungsional secara optimal diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan berbagai kegiatan di sebuah pelabuhan perikanan. Pasar ikan adalah tempat yang penting untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat. Ini membantu memastikan pasokan ikan yang segar dan berkualitas untuk konsumen serta mendukung perekonomian lokal. pasar ikan yang terdapat di PPN Karangantu berdiri sejak tahun 2011 dengan luas 60m².

Tempat pengepakan ikan merupakan fasilitas di mana ikan segar yang ditangkap dari perairan diproses, dibersihkan, dipotong, dan dikemas untuk didistribusikan ke pasar atau konsumen. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti pemotongan, pengupasan, penyaringan, dan pengemasan ikan. Tempat pengepakan ikan di PPN Karangantu berdiri sejak tahun 2009 dengan luas 223 m². Di Karangantu, tempat pelelangan ikan merupakan area di mana ikan yang ditangkap oleh nelayan atau perusahaan perikanan diperdagangkan melalui proses lelang kepada pembeli yang hadir. Fasilitas pelelangan ikan ini telah beroperasi sejak tahun 2015 dengan luas mencapai 360m². Di sana, para pembeli dapat mengajukan penawaran untuk membeli ikan yang mereka inginkan, dengan mempertimbangkan kualitas, jenis, dan harga yang telah ditetapkan.

Proses pelelangan ikan bertujuan untuk menentukan harga ikan secara adil, dengan melibatkan penawaran dari para pembeli yang bersaing. Kegiatan pelelangan ikan di PPN Karangantu biasanya berlangsung pada pagi dan sore hari. Nelayan yang menggunakan jaring dogol (danish seine) cenderung melakukan pelelangan ikan pada sore dan malam hari, sementara nelayan yang menggunakan jaring rampus (bottom set gill net) melakukan kegiatan tersebut pada pagi hari. Salasar TPI Karangantu adalah salah satu pusat utama kegiatan pelelangan ikan di wilayah tersebut. Di tempat ini, para nelayan dan pedagang ikan berkumpul untuk menjual dan membeli ikan melalui proses lelang. Tujuan utama dari Salasar TPI Karangantu meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi distribusi ikan, dengan memastikan bahwa ikan yang ditangkap didistribusikan secara efisien ke pasar-pasar lokal dan regional.
2. Mendorong transparansi dan kompetisi dalam proses lelang ikan, sehingga harga ikan ditentukan secara adil dan berdasarkan mekanisme pasar yang sehat.
3. Mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan.
4. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan peluang kepada nelayan dan pedagang lokal untuk berpartisipasi dalam pasar ikan yang terorganisir dan terbuka.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, fasilitas bengkel menyediakan berbagai layanan jasa yang mendukung kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan. Bengkel tersebut berdiri sejak tahun 1977 dan masih beroperasi baik sampai sekarang.

PPN Karangantu menawarkan layanan ruang penyimpanan dingin atau cold storage untuk produk perikanan dengan kapasitas penyimpanan sebesar 25 hingga 30 ton,

dilengkapi dengan pengaturan suhu penyimpanan dingin yang optimal. Layanan jasa cold storage ini bertujuan untuk memastikan kesegaran dan kualitas produk perikanan tetap terjaga. Cold storage PPN Karangantu beroperasi setiap hari mulai dari jam 08.00 hingga 15.00, dan tarif penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini, stok produk perikanan yang tersimpan di cold storage PPN Karangantu mencapai 7 ton.

Fasilitas kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan memiliki tujuan utama untuk menyediakan instrumen pemerintah melalui proses perizinan, khususnya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal yang hendak berlayar. SPB ini memiliki masa berlaku selama 24 jam sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk satu kali pelayaran. Kantor administrasi ini telah berdiri sejak tahun 1979.

Laboratorium mutu di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Serang, Banten, memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk perikanan yang diolah dan didistribusikan dari pelabuhan tersebut. Fungsi laboratorium mutu mencakup berbagai aspek, termasuk pengujian kualitas produk, pemeriksaan keamanan pangan, penelitian dan pengembangan, pendukung keputusan, pemantauan lingkungan, serta sertifikasi dan akreditasi produk. Dengan melakukan pengujian yang teliti dan akurat, laboratorium mutu membantu memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan produk tersebut dapat dipasarkan dengan baik dan dijamin aman untuk dikonsumsi. Sebagai hasilnya, laboratorium mutu menjadi salah satu komponen utama dalam menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap produk perikanan yang berasal dari PPN Karangantu.

3. Fasilitas Penunjang

No	FASILITAS	Unit/Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1.	Rumah Kepala Pelabuhan	1	1977/2004	Baik	Sudah
2.	Rumah Dinas Pelabuhan	1	2012	Baik	Sudah
3.	Kios Nelayan	1	2005	Rusak	Sudah
4.	Pos Security/Pos Jaga	1	2008	Baik	Sudah
5.	Kedai Nelayan	1	2005	Baik	Sudah
6.	MCK	1	2015	Baik	Sudah
7.	Tempat Peribadatan	1	2020	Baik	Sudah

Fasilitas penunjang pelabuhan perikanan adalah berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas di pelabuhan, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses utama. Fasilitas ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Karangantu ini sangat beragam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung kegiatan di sekitar pelabuhan.

Rumah Kepala Pelabuhan yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun

1977/2004 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi sebagai tempat tinggal kepala pelabuhan dengan tujuan utamanya adalah menyediakan akomodasi sementara bagi mereka untuk menjalankan tugas dan aktivitas kerja yang memerlukan keberadaan mereka di lingkungan kerja tersebut.

Rumah Dinas Pelabuhan yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2012 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pegawai, staf, atau karyawan yang bekerja di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka. Tujuan utamanya adalah menyediakan akomodasi sementara bagi mereka untuk menjalankan tugas dan aktivitas kerja yang memerlukan keberadaan mereka di lingkungan kerja tersebut. Fasilitas Penunjang ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

Kios Nelayan yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2005 dengan kondisi kurang baik namun sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi sebagai tempat penjualan ikan atau aneka binatang laut lainnya yang merupakan hasil tangkapan langsung oleh nelayan di PPN Karangantu sebagai tempat jual beli yang menunjang perekonomian bagi para nelayan. Fasilitas Penunjang ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

Pos Security/Pos Jaga yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2008 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi untuk melindungi dan memelihara keamanan dalam semua aktivitas dan kegiatan nelayan di pelabuhan (Artika, 2022). Fasilitas Penunjang ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

Kedai Nelayan yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2005 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi sebagai tempat jual beli makanan jadi yang dijual oleh para nelayan PPN Karangantu yang menjadi sumber penghasilan guna menunjang perekonomian.

MCK yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2015 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. MCK merupakan fasilitas yang sangat menunjang kegiatan yang berada di PPN Karangantu dan merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air. Fasilitas Penunjang ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

Tempat Peribadatan yang terdapat di PPN Karangantu didirikan pada tahun 2020 dengan kondisi baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Fasilitas penunjang ini berfungsi sebagai tempat beribadah yang disiapkan agar mereka dapat menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Fasilitas Penunjang ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, terdapat beberapa fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu yang mengalami kerusakan atau sedang dalam proses pembangunan. Namun, di samping itu, PPN Karangantu telah berhasil menerapkan berbagai fasilitas pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Penerapan ini mencakup penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung operasional pelabuhan, termasuk area untuk berlabuh, merapat, dan mendaratkan hasil tangkapan. Selain itu, tersedia juga fasilitas untuk penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Semua upaya ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan perikanan di PPN Karangantu, memastikan bahwa pelabuhan tetap berfungsi optimal meskipun ada beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan atau sedang dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Diniah, dkk. (2012). Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Terhadap Kebutuhan Operasi Penangkapan Ikan. *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*, 2(1), 41-49
- Direktorat Kepelabuhan Perikanan. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan : Pelabuhan Perikanan Karangantu. Diakses 1 Juni 2024, dari https://pipp.kkp.go.id/Ct_menu/profildetailland/127 [KKP] Kementerian Kelautan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per. 08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Pohan, Rusdin. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Ar-Rijal Institute. Yogyakarta.
- Satir, S., dkk. (2021). Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Bali. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan*, Vol 1, 248-260
- Suherman, A., dkk. (2020). Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Karangantu - Banten, Indonesia. *DEPIK : Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, 9(2), 344-355
- Sutrisno, E. (2014). Pangkalan pendaratan ikan (PPI) tipe b Pelabuhan Nusantara Pantai Sendang Biru Malang: Tema eko-arsitektur. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Soumokil, R.P. (2020). Identifikasi Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. *Jurnal Masohi*. Universitas Pattimura, 1(1)
- Teturan, Y.E., & Megawati. (2021). Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 10(2), 112 – 127.